

**TATA KELOLA KEUANGAN YANG BAIK
UNTUK PERDAMAIAN**

**(Analisis Keagenan atas Tata Kelola Keuangan
di Jemaat GPID Manunggal Palu)**

TESIS



Oleh:

YANCE DARMAWAN

NIM: 54150006

PROGRAM STUDI KAJIAN KONFLIK DAN PERDAMAIAN

BIDANG MINAT STUDI PERDAMAIAN (MAPS)

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2017

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul:

TATA KELOLA KEUANGAN YANG BAIK UNTUK PERDAMAIAN

(Analisis Keagenan atas Tata Kelola Keuangan di Jemaat GPID Manunggal Palu)

Oleh:

Yance Darmawan (54150006)

Telah diajukan dan dipertahankan dalam Ujian Tesis Pascasarjana (S2)
Program Studi Kajian Konflik dan Perdamaian Bidang Minat Studi Perdamaian,
Fakultas Teologi, Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta,
dan dinyatakan DITERIMA, serta memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar akademik
Magister Sains (M.Si) yang setara dengan gelar international *Master of Arts in Peace Studies*
(MAPS), pada tanggal 10 Juli 2017.

Pembimbing I,



Perminas Pangeran, M.Si, Ph.D.

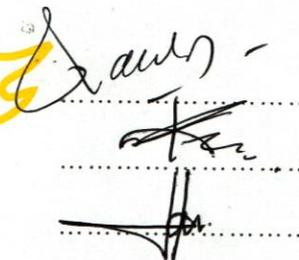
Pembimbing II,



Drs. David S. Widihandojo, B.Sc, Ph.D.

Penguji :

1. Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D.
2. Perminas Pangeran, M.Si, Ph.D.
3. Drs. David S. Widihandojo, B.Sc, Ph.D.



Kaprodi S2 Ilmu Teologi & Kajian Konflik dan Perdamaian,




Pdt. Handi Hadiwitanto, Ph.D.

PERNYATAAN INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

N a m a : **Yance Darmawan**

NIM : **54150006**

Judul Tesis : **Tata Kelola Keuangan Yang Baik Untuk Perdamaian**
(Analisis Keagenan atas Tata Kelola Keuangan di Jemaat GPID Manunggal Palu).

Dengan ini menyatakan, bahwa tesis ini merupakan karya tulis yang bersifat otentik. Adapun setiap penggunaan pikiran atau tulisan orang lain diberikan catatan referensi.

Yogyakarta, 10 Juli 2017

Penulis,



Yance Darmawan

KATA PENGANTAR

Tata kelola keuangan yang baik untuk perdamaian (analisis keagenan atas tata kelola keuangan di jemaat GPID Manunggal Palu), merupakan judul dari tesis ini, yang terinspirasi dari pengalaman pelayanan di tengah jemaat dan masyarakat. Tesis yang jauh dari kesempurnaan ini penulis harapkan akan menjadi dorongan untuk memberikan perhatian lebih terhadap tata kelola keuangan jemaat / gereja, sehingga jemaat / gereja semakin efektif dalam melaksanakan panggilan dan pengutusannya untuk menjadi saksi Tuhan dan berkat bagi sesama.

Dengan selesainya tesis ini, maka penulis sepatutnya mengungkapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Tuhan Allah, Bapa Yang Mahakuasa, yang telah memperkenankan penulis menyelesaikan tesis ini sebagai bagian dari persyaratan penyelesaian studi Pascasarjana (S2) Prodi Kajian Konflik dan Perdamaian Bidang Minat Studi Perdamaian (MAPS), di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta. Penulis sangat merasakan tuntunan dan kemurahan Bapa Sorgawi, sepanjang proses studi sampai pada penyelesaiannya.

Begitu banyak pihak yang telah Tuhan libatkan dalam menopang dan memotivasi penulis selama proses studi dan pembuatan tesis ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada :

1. Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia Donggala, yang memberikan rekomendasi, bantuan studi melalui kemitraan dengan EMS Jerman, dan motivasi untuk penyelesaian studi ini.
2. Foce Training Provider (FTP) yang memfasilitasi, mengusahakan beasiswa selama studi, bahkan biaya buku-buku yang diperlukan, serta memberikan semangat dan pendampingan melalui Ibu F.Dorothea E.Wehtantouw, S.Th, MM., Ibu Pdt. Meity Caroles, S.Th., Bpk.Jonatan Rahardjo, dan Pdt. Ronny Nathanael, M.Th.
3. Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), melalui Ketua Prodi Pascasarjana (S2) Fakultas Teologi, para dosen, dan teristimewa Dosen Pembimbing, Bpk. Perminas Pangeran, M.Si, Ph.D. dan Bpk. Drs. David S.Widihandojo, B.Sc, Ph.D., serta Dosen Penguji, Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D. yang sudah berbagi pengetahuan dan membimbing penulis.

4. Majelis dan Jemaat GPID Manunggal Palu, yang telah mendukung secara materil dan moril, atas semua perhatian, kesabaran dan kerja sama yang baik, sehingga memungkinkan terlaksananya proses studi sampai pada penyelesaiannya.
5. Pengurus KSP Sunhodos, yang memberikan perhatian dan dukungan, terlebih dalam memfasilitasi “Focus Group Discussion”.
6. Bpk. Ir. Johnny Wongkar, sebagai sahabat yang memberi semangat dan teman diskusi yang baik, khususnya ketika melaksanakan research dan penulisan tesis.
7. Bpk. Pnt. Djemil Mintamanis, Ibu Pnt. Vemmy N. Marcus, S.Sos, Bpk. Jeremia Tapussa, SE, dan Bpk. Frits Mangempis, serta bapak/ibu lainnya, yang sudah memberikan masukan pemahaman pikiran dan pengalaman yang memperkaya tulisan ini.
8. Teman seperjuangan: Pdt.Selvina K.Wuanya, S.Th, MM, Pdt.Olga J.Walangitan, S.Th, dan Pdt.Yandrik Y.Pesik, S.Th., juga Pdt.Lucky R.A.Malonda, S.Th., Pdt.Oktam Lago, S.Th., Pdt. I Wayan Sastrawan Wirajaya, S.Th., dan Pdt. Novisius Bivarely Bokay, S.Th.
9. Isteri terkasih: Marsye Langelo, dan anak-anakku: Anastassia Greatia, Jeaneke Stevani, Ayu Patricia Sari, dan Michelle Charista Yap, yang selalu memberi kehangatan kasih, semangat dan motivasi untuk segera menyelesaikan studi.
10. Mama tercinta, dan sanak saudara, yang selalu mendukung dan memberi perhatian.

Semoga Tuhan Allah, Bapa Yang Mahakuasa, mengaruniakan berkat-berkat terbaik, tuntunan dan kemurahan-Nya, dalam kehidupan kita sekalian, sehingga hidup kita selalu memuliakan Tuhan Allah, Bapa dalam Yesus Kristus, melalui pelayanan masing-masing.

Salam damai,

Yance Darmawan.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Pernyataan Integritas	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Abstrak	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	13
1.3 Rumusan Masalah	14
1.4 Tujuan Penelitian	15
1.5 Manfaat Penelitian	15
1.6 Metode Penelitian	16
1.7 Sistematika	22
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL DAN TEORITIS	
2.1 Tata Kelola Yang Baik (Good Governance)	24
2.2 Pengelolaan Keuangan	27
2.2.1. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Pengelolaan Keuangan	27
2.2.2. Pengelolaan Keuangan Jemaat	28
2.3 Kajian Konflik	31
2.3.1. Pengertian Konflik	31

2.3.2. Konflik Jemaat	34
2.4 Perdamaian	37
2.4.1. Makna Perdamaian	37
2.4.2. Visi “Shalom Kerajaan Allah”	39
2.4.3. GPID dan Visi Perdamaian	41
2.5 Landasan Teoritik	45
2.5.1. Teori Keagenan	45
2.5.2. Relevansi Teori Keagenan	47
2.6 Model Evaluasi	48
2.7 Kerangka Pemikiran	49
BAB III TATA KELOLA KEUANGAN JEMAAT GPID MANUNGGAL PALU	
3.1 Gambaran Jemaat GPID Manunggal Palu	50
3.2 Tata Kelola Keuangan Jemaat GPID Manunggal Palu	56
3.2.1. Aspek Kelembagaan	56
3.2.2. Aspek Kebijakan dan Prosedur	65
3.2.3. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)	69
3.2.4. Aspek Aset dan Fasilitas	73
3.2.5. Aspek Akuntabilitas	77
BAB IV ANALISIS TATA KELOLA KEUANGAN JEMAAT GPID MANUNGGAL PALU DARI PERSPEKTIF TATA KELOLA YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE), TEORI KEAGENAN DAN PERDAMAIAN	
4.1 Tata Kelola Keuangan Jemaat GPID Manunggal Palu Dari Perspektif Tata Kelola Yang Baik (Good Governance)	83

4.2 Tata Kelola Keuangan Jemaat GPID Manunggal Palu Dari Perspektif Teori Keagenan	90
4.3 Tata Kelola Keuangan Jemaat Yang Baik Sebagai Perdamaian	96
4.4 Model Tata Kelola Keuangan Jemaat GPID	97
BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI	
5.1 Kesimpulan	102
5.2 Keterbatasan	105
5.3 Rekomendasi	106
DAFTAR KEPUSTAKAAN	108
LAMPIRAN 1: PANDUAN WAWANCARA	113
LAMPIRAN 2: TRANSKRIP WAWANCARA	117
LAMPIRAN 3: NOTULEN FOCUS GROUP DISCUSSION	149
LAMPIRAN 4: SURAT IJIN PENELITIAN	157
LAMPIRAN 5: KONSEP UNDANGAN FOCUS GROUP DISCUSSION.....	158
LAMPIRAN 6: DAFTAR PESERTA FOCUS GROUP DISCUSSION	159

ABSTRAK

Tata kelola yang baik (*good governance*) terhadap keuangan jemaat / gereja perlu menjadi perhatian dari para pelayan dan warga jemaat, sehingga jemaat / gereja dapat melaksanakan panggilan dan pengutusannya secara efektif. Sebab banyak permasalahan dalam jemaat, bahkan tidak jarang menimbulkan konflik internal jemaat, karena kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan keuangan jemaat.

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap jemaat GPID Manunggal Palu memperlihatkan, bahwa pengelolaan keuangan jemaat belum dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Dari berbagai aspek yang diteliti, seperti aspek kelembagaan, kebijakan dan prosedural, sumber daya manusia (SDM), aset dan fasilitas, dan akuntabilitas, menunjukkan berbagai kelemahan. Semua itu telah menimbulkan permasalahan dalam jemaat, yang berdampak kepada menurunnya kepercayaan dan dukungan jemaat.

Kelemahan dalam pengelolaan keuangan jemaat / gereja akan mempengaruhi aktifitas pelayanan, dan pada akhirnya kepada visi jemaat / gereja untuk menghadirkan perdamaian di tengah masyarakat. Tata kelola keuangan jemaat yang baik dibutuhkan bukan hanya untuk meminimalisir konflik, melainkan suatu upaya kreatif untuk merawat keutuhan persekutuan, yang terpenggil dan diutus ke dalam dunia untuk menghadirkan perdamaian di tengah kehidupan.

Untuk itu diperlukan sebuah model tata kelola keuangan jemaat / gereja yang baik, sehingga dapat meminimalisir konflik internal dan menguatkan peran jemaat di tengah masyarakat, yaitu untuk membawa perdamaian.

Kata kunci : *Tata kelola, keuangan, jemaat/gereja, konflik, perdamaian.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang.

Tata kelola yang baik (good governance) dalam berbagai bidang pelayanan publik merupakan impian dari banyak orang saat ini.¹ Sebab banyak orang merasa kurang puas dengan kinerja pelayanan publik selama ini, baik yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta, termasuk dalam persekutuan jemaat atau gereja. Ada begitu banyak persoalan muncul yang dipicu oleh berbagai kelemahan pelayanan, bahkan penyalahgunaan yang dilakukan oleh mereka yang dipercayakan untuk melaksanakan tugas pelayanan, sehingga merugikan dan menghambat perkembangan organisasi jemaat atau gereja. Untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik, serta menghindarkan terjadinya berbagai penyimpangan yang dapat menghambat pelayanan dan kesaksian jemaat di tengah masyarakat, maka tata kelola yang baik (good governance) perlu menjadi perhatian.

Salah satu unsur penting yang perlu mendapat perhatian dalam tata kelola yang baik (good governance) ialah berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Sebab pengelolaan keuangan merupakan aspek yang perlu diperhitungkan dalam sebuah organisasi dan lembaga, termasuk persekutuan jemaat atau gereja, dalam rangka mengembangkan pelayanannya. Tata kelola yang baik terhadap keuangan yang ada dalam jemaat atau gereja akan membawa manfaat yang besar bagi warga jemaat. Sebaliknya, pengelolaan keuangan yang tidak baik, maka dapat menimbulkan berbagai masalah, terutama konflik internal, yang dapat merusak dan memecah-belah persekutuan jemaat atau gereja. Oleh sebab munculnya rasa saling curiga dan ketidakpercayaan satu terhadap lainnya.

Jelasnya kehidupan persekutuan jemaat atau gereja tidak bisa dilepaskan juga dari dukungan keuangan. Keuangan merupakan potensi yang sangat diperlukan dan menentukan dalam menunjang berbagai aktifitas kehidupan dan pelayanan jemaat atau gereja. Dengan pengelolaan keuangan jemaat yang disesuaikan ketentuan dan standar tata kelola yang baik, maka jemaat dapat

¹ Agus Dwiyanto (ed.), *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hal. 1.

melaksanakan penatalayanan secara efektif dan efisien, bahkan meningkatkannya, dalam rangka mewujudkan panggilan dan pengutusannya.

Sutan M. Hutagalung memberikan gambaran tentang bagaimana aktifitas gereja yang selalu berhubungan dengan keuangan, seperti persembahan, iuran-iuran, target dan sebagainya, sehingga kehidupan gereja terlihat begitu melekat kepada uang.² Hal itu tidak berarti, bahwa jemaat memandang uang sebagai sumber kehidupannya, sehingga berupaya dengan segala cara untuk memperoleh dan menggunakan uang sesuai dengan keinginannya. Bagi jemaat atau gereja, uang hanya merupakan sebagai suatu kebutuhan, karena fungsinya sebagai alat pembelian atau pembayaran, yang menunjang aktifitas gerejawi. Sebab berbagai kegiatan gerejawi dan pembangunan jemaat memerlukan pembiayaan, yang semuanya itu berhubungan dengan uang. Terlebih seiring dengan perkembangan zaman, tuntutan terhadap peningkatan kinerja pelayanan jemaat semakin tinggi, maka kebutuhan akan keuangan pun semakin meningkat. Dengan demikian, pengelolaan keuangan jemaat yang baik sangat dibutuhkan demi meningkatkan kepercayaan (trust) warga jemaat untuk memberikan kontribusi dalam menopang pembiayaan jemaat.

Pelaksanaan berbagai kegiatan gerejawi dan pembangunan jemaat pada kenyataannya sering tersendat-sendat dan tidak lancar. Hal ini terjadi seringkali bukan karena jemaat tidak mempunyai potensi dan kecukupan keuangan. Namun disebabkan karena tata kelola keuangan dalam jemaat-jemaat tersebut yang tidak tertib. Banyak warga jemaat yang mengeluh, karena persembahan yang diberikan dengan sukacita sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan, ternyata tidak digunakan dengan semestinya, atau dalam penggunaannya tidak transparan, serta pelaporannya tidak akuntabel. Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam jemaat pun penyimpangan dan penyalahgunaan keuangan dapat terjadi. Korupsi dapat dilakukan oleh para penyelenggara pelayanan, misalnya dalam bentuk “*mark up*” terhadap barang-barang yang dibelanja, atau penggunaan keuangan yang tidak transparan dan akuntabel. Transaksi keuangan jemaat yang tidak berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, serta ketidaksesuaian antara anggaran pendapatan dan belanja jemaat dengan realisasinya.

² Sutan M. Hutagalung, *Identitas Kepemimpinan Pelayan Gereja : Dalam Konteks Kemandirian Theologia, Daya, dan Dana*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1997), hal. 35.

Pelaporan keuangan jemaat sering kali tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, jauh dari harapan jemaat, sehingga menimbulkan berbagai asumsi dan kecurigaan dari warga jemaat. Misalnya, ada persembahan-persembahan yang tidak tercatat, atau salah dalam pencatatan, terjadi selisih keuangan dan salah perhitungan dalam laporan, sehingga harus beberapa kali dikoreksi. Karena pengelolaan keuangan yang tidak transparan dan akuntabel, makanya keuangan jemaat sering jauh dari target yang diharapkan, di mana penerimaan keuangan tidak seimbang dengan kebutuhan anggaran yang diharapkan. Semua ini menunjukkan, bahwa warga jemaat merasa tidak puas terhadap kinerja pelayanan dari para perangkat pelayan. Keadaan ini berdampak pada banyaknya kegiatan yang direncanakan, yang seharusnya menjawab kepentingan dan kebutuhan jemaat dan masyarakat itu sendiri, justru tidak terlaksana secara optimal. Semua ini menggambarkan belum terselenggaranya tata kelola yang baik dalam jemaat.

Warga jemaat sebagai stakeholder, yang bisa juga diandaikan sebagai pemilik modal, yang menginvestasikan keuangan mereka melalui persembahan dan berbagai kewajiban lainnya dalam mendukung kegiatan pelayanan jemaat, seharusnya memperoleh informasi yang jelas dan akurat tentang keuangan jemaat. Hal ini diperlukan untuk memberikan keyakinan / kepercayaan kepada warga jemaat, bahwa investasi uang mereka benar-benar telah digunakan atau dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab oleh para pelayan Tuhan, atau mereka yang dipercayakan untuk mengelola keuangan. Bukan dikelola secara asal-asalan, apalagi disalahgunakan. Warga jemaat mengharapkan, bahwa keuangan jemaat akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan jemaat maupun masyarakat, sebagai representasi dari kehendak Tuhan. Jemaat atau gereja sebagai organisasi keagamaan, betul-betul diharapkan dapat melaksanakan tata kelola yang baik, yang dilandasi ketulusan, kejujuran dan takut akan Tuhan.

Penyalahgunaan keuangan atau korupsi, sebagaimana yang membudaya dalam masyarakat merupakan suatu kejahatan atau dosa besar, yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama. Seharusnya gereja, menurut August Corneles T. Karundeng, menjalankan fungsinya untuk mengingatkan dalam masalah ini.³ Namun fenomena penyalahgunaan keuangan, ternyata bukan saja membudaya di luar gereja, namun juga dapat terjadi di dalam gereja, sebagaimana

³ August Corneles T. Karundeng, *Etika Anti Korupsi: Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Kristen Dalam Konteks Persoalan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Grafika KreasIndo, 2015), hal. 27-28.

tulisan yang merupakan hasil pengamatan dari Tersia Musanti,⁴ di mana ia menemukan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam gereja secara administratif dan pelaksanaannya. Seperti seorang bendahara yang sebenarnya tidak memiliki kecakapan tentang keuangan. Program pelayanan yang diteruskan dari tahun ke tahun, sehingga tidak menjawab perkembangan dan kebutuhan jemaat. Neraca keuangan yang tidak seimbang antara belanja dan pendapatan di mana didominasi pengeluaran teknis untuk kebutuhan pendukung yang lebih besar dari pada program pokok. Bahkan sering terjadi permasalahan keuangan, seperti korupsi dana pelayanan dan pembangunan gereja oleh perangkat gereja, kolusi internal perangkat gereja dan oknum di luar gereja untuk memanipulasi anggaran, serta terjadinya kesalahan perhitungan saat perencanaan anggaran, dan sebagainya.

Dalam Tata Gereja GPID mengatur suatu peraturan khusus tentang penatalayanan administrasi keuangan jemaat / gereja, misalnya pengaturan tugas seorang bendahara, yaitu untuk menerima, membukukan, menyimpan, mengeluarkan, dan mempertanggungjawabkan segala harta milik yang dikelola oleh gereja dalam rangka penatalayanan.⁵ Bagaimana fungsi-fungsi manajemen keuangan dijalankan dalam jemaat atau gereja, sampai kepada pengawasan keuangan yang dilakukan oleh suatu Badan Pengawas Perbendaharaan (BPP) jemaat. Bahkan Sinode GPID sendiri pernah menerbitkan suatu Pedoman Kerja Tatalaksana Administrasi (Keuangan-Pembukuan-Perbendaharaan dan Administrasi Gereja) Lingkup Jemaat GPID,⁶ yang sebenarnya hanya mengadopsi aturan-aturan yang ada dalam Tata Gereja GPID.

Dalam implementasinya, pedoman dan aturan-aturan yang dibuat pada taraf sinode tersebut, seringkali belum menjemaat, atau tidak menjadi perhatian dan dilaksanakan secara konsekuen di tengah-tengah jemaat. Dalam jemaat-jemaat sering terjadi kebijakan-kebijakan yang berbeda dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya, menurut ketentuan Tata Gereja, tidak mengizinkan adanya peminjaman uang kas jemaat, namun dalam prakteknya masih ada jemaat yang meminjamkan uang kas jemaat kepada anggota-anggota jemaat, bahkan dengan membungakan, dan sebagainya.

⁴ Tersia Musanti, *Penyimpangan Manajemen Keuangan Gereja: Memanfaatkan Celah antara Profesionalisme dan Program Kerja*, www.sabdaspacespace.org/keuangan_gereja_antara_profesionalisme_dan_pelayanan. Diakses tanggal 28 Juli 2008.

⁵ *Tata Gereja GPID, Peraturan tentang Perbendaharaan, Bab I, Pasal 2*, hal. 76.

⁶ *Pedoman Kerja Tata Laksana Administrasi: Keuangan-Pembukuan-Perbendaharaan dan Administrasi Gereja Lingkup Jemaat GPID*, (Majelis Sinode Harian GPID, 2004).

Tugas pengelolaan keuangan jemaat, sebenarnya bukan hanya domain atau menjadi tanggung jawab perbendaharaan jemaat (bendahara), namun juga berkaitan dengan kewenangan dari ketua jemaat. Ketua jemaat bersama bendahara jemaat bertanggung jawab terhadap sirkulasi keuangan jemaat. Selain itu, pada jemaat-jemaat besar yang ada di perkotaan mempunyai pula staf keuangan yang bertugas membantu perbendaharaan. Ketika terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan, maka semua pihak harus diminta penjelasan dan pertanggungjawaban, bukan para pihak saling mempersalahkan satu terhadap yang lain. Biasanya pihak yang sering disudutkan sebagai yang bersalah ialah bendahara, karena jabatannya, padahal mungkin saja ketua jemaat mempunyai andil sesuai kewenangannya.

Dalam sistem presbiterial sinodal yang dianut oleh GPID, pimpinan jemaat disebut Majelis Jemaat, yang terdiri dari penatua, diaken dan pendeta jemaat (pendeta organik GPID). Mereka disebut pula sebagai pelayan khusus gereja, yang dipilih dan ditetapkan oleh jemaat melalui sidang sisi-sidi jemaat untuk masa pelayanan lima tahun (satu periode). Pelayan khusus, sesuai Tata Gereja GPID, Peraturan Tentang Pelayan-pelayan Khusus dan Pegawai Gereja, adalah seorang anggota sisi jemaat GPID yang telah diurapi menjadi Pendeta, diteguhkan menjadi Penatua dan Diaken,⁷ yang melaksanakan tugas masing-masing dalam persekutuan pelayanan. Artinya, Majelis Jemaat melaksanakan tugas panggilan pelayanan secara kolektif-kolegial, yang terwujud dalam rapat-rapat untuk pengambilan keputusan.

Jabatan kependetaan mempunyai kekhususan, karena diperoleh setelah melalui pendidikan teologia yang diakui GPID, dan lewat suatu proses penerimaan yang cukup ketat sesuai pengaturan Sinode. Tetapi jabatan Penatua dan Diaken dipilih dan ditetapkan dari antara anggota sisi jemaat biasa (awam) dengan persyaratan sesuai ketentuan Alkitab (1 Timotius 3:1-13; Titus 1:5-9),⁸ yang dalam prakteknya tidak mudah secara obyektif diterapkan. Sebab tidak mudah mengukur kualitas moral spiritualitas seseorang sebagaimana yang disyaratkan dalam Alkitab.

Pada umumnya jemaat memilih seseorang, karena melihat dari segi penampilan luar, status sosial – ekonomi, faktor hubungan keluarga dan pertemanan / kedekatan. Jemaat belum memberi perhatian kepada aspek kemampuan dan keterampilan seseorang. Misalnya, seorang yang akan menduduki jabatan sebagai bendahara jemaat, sekurang-kurangnya tentu harus memahami hal-hal

⁷ *Tata Gereja GPID, Peraturan tentang Pelayan-pelayan Khusus dan Pegawai Gereja, Bab I, Pasal 1*, hal. 61.

⁸ *Ibid., Peraturan tentang Jemaat, Bab X, Pasal 33*, hal. 26.

yang berkaitan dengan administrasi keuangan dan pembukuan. Begitu pula mereka yang dipilih dalam jabatan-jabatan lainnya, seharusnya mempertimbangkan kemampuan dan karunia masing-masing. Dengan kata lain, bagaimana memilih dan menempatkan seseorang pada tempat yang tepat. Sebab bagaimana mungkin seseorang dapat menjalankan tugasnya dengan baik, apabila dia sendiri tidak memahami hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Jadi proses pemilihan Majelis Jemaat, juga dalam penentuan seseorang dalam jabatan-jabatan, seperti ketua, sekretaris dan bendahara jemaat, pada umumnya belum berdasarkan pada kapasitas kemampuan atau keterampilan yang dimiliki. Seorang yang diposisikan sebagai bendahara jemaat, belum tentu menguasai administrasi pembukuan dan akuntansi keuangan, sehingga tidak terhindarkan dapat terjadi kesalahan-kesalahan yang bersifat administratif. Dalam hal ini perlu ada kriteria khusus yang dibuat sebelum pelaksanaan pemilihan, namun hal seperti ini sering diabaikan, karena dianggap membatasi karya Roh Kudus.

Dalam rangka memperlengkapi para Majelis Jemaat, supaya dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan, sebenarnya telah dilaksanakan pembinaan dan pelatihan, baik berkaitan tentang kepemimpinan dan manajemen gerejawi, serta keterampilan pelayanan lainnya, yaitu pada awal periode pelayanan maupun secara berkala minimal setahun sekali, atau sesuai pengaturan dari Majelis Sinode. Namun pembinaan dan materi-materi yang diberikan belum memadai dan sekedar dilaksanakan, sehingga belum mampu membawa perbaikan dalam pelayanan jemaat-jemaat. Sebab terbukti ada begitu banyak persoalan yang terjadi dalam jemaat-jemaat yang tidak dapat diselesaikan dengan tuntas. Juga seiring dengan perkembangan zaman, maka semakin banyak hal yang dituntut dari seorang pelayan khusus.

Dalam penatalayanan persekutuan jemaat, maka aspek administrasi jelas tidak boleh diabaikan. Sebab menurut Yakub B. Susabda, bahwa walaupun administrasi memang bukan segala-galanya, namun sangat diperlukan sebagai alat dalam pelayanan untuk mengatur langkah-langkah kehidupan gereja menuju kepada tujuan yang ingin dicapai.⁹ Administrasi yang baik, memang belum tentu menjamin sudah tidak akan terjadi masalah. Sebab administrasi hanyalah alat yang dijalankan oleh manusia, seperti sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang pengemudi. Walaupun mobil tersebut supercanggih, dalam artian sangat berkualitas dengan perlengkapan

⁹ Yakub B. Susabda, *Prinsip-prinsip Pertimbangan Utama Dalam Administrasi Gereja*, (Malang: Gandum Mas, 2002), hal. 5-24.

keamanan yang tinggi, namun bukan berarti sudah tidak mungkin terjadi kecelakaan. Semua tergantung dengan bagaimana pengendaranya menjalankannya. Administrasi gereja pun demikian, dapat terlaksana dengan baik dan bertanggung jawab, sangat tergantung kepada bagaimana orang-orang yang berada di belakang administrasi itu.

Permasalahan yang menjadi perhatian penulis sebagai pendeta jemaat di GPID Manunggal Palu, yaitu berkaitan dengan tata kelola keuangan jemaat, yang menyebabkan terjadinya konflik internal jemaat. Pengelolaan keuangan jemaat ini dalam pelaksanaannya tidak tertib, misalnya dalam warta jemaat dan laporan keuangan yang disampaikan sering tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Adanya kekurangjelasan dalam pertanggungjawaban, dan sebagainya, sehingga mendapat tanggapan kritis dari warga jemaat. Selanjutnya tidak bisa terhindarkan terjadinya konflik internal jemaat. Dalam pengamatan penulis, bahwa konflik antara para pihak dalam jemaat, baik antara Majelis Jemaat dengan Badan Pengawas Perbendaharaan, antara anggota Majelis Jemaat sendiri, antara Majelis Jemaat dengan anggota jemaat, bahkan antar individu dan keluarga dalam jemaat, walaupun skalanya berbeda-beda, namun pemicunya sama, yaitu adanya kesimpangsiuran dalam pengelolaan keuangan jemaat.

Pada awalnya mengemuka adanya selisih antara catatan laporan dan keadaan fisik keuangan yang ditangani oleh bendahara jemaat. Hal itu terjadi ketika akan mempersiapkan pelaksanaan sidang sidi-sidi jemaat dalam rangka pertanggungjawaban program kerja dan keuangan jemaat tahun 2014. Persoalan tersebut sempat menimbulkan ketegangan di antara sesama Majelis Jemaat, yang sedang mempersiapkan materi laporan Majelis Jemaat. Menurut Badan Pengawas Perbendaharaan jemaat, bahwa selisih tersebut disebabkan adanya kesalahan dalam pencatatan dan penghitungan. Tetapi setelah beberapa kali dilaksanakan pemeriksaan, tidak mendapatkan kejelasan atau titik temu penyelesaian tentang temuan selisih tersebut.

Dalam suatu rapat Majelis Jemaat menyepakati untuk membentuk team verifikasi dalam rangka membantu bendahara melacak pembukuan, walaupun sudah diperiksa oleh BPP, agar dapat menemukan letak permasalahannya. Justru team memberikan laporan mendapatkan temuan-temuan, bahwa ada banyak item dalam pengeluaran yang tidak sesuai dengan kenyataan, karena tidak disertai nota / kwitansi. Ada kwintansi yang tidak ditandatangani ketua maupun bendahara sendiri. Maka team akhirnya menyimpulkan, bahwa bukan hanya terdapat kelemahan dalam pencatatan, melainkan juga telah terjadi “kecolongan” dalam pengelolaan keuangan jemaat.

Menurut pengamatan penulis, bahwa sebenarnya kelemahan ini sudah terjadi dari tahun-tahun sebelumnya, namun tidak secara tuntas diselesaikan bersama Majelis Jemaat dan BPP, sehingga menjadi masalah dari tahun ke tahun. Sebab dalam jemaat ini, kurang mampu bersikap tegas terhadap permasalahan yang dihadapi, karena takut menyinggung perasaan satu dengan lainnya. Makanya seolah-olah terjadi pembiaran, sehingga masalah menjadi berlarut-larut.

Sidang sisi-sidi jemaat yang membahas laporan pertanggungjawaban program kerja dan keuangan jemaat tahun 2014, baru dapat dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2015. Dalam laporan Majelis Jemaat ini tetap menyatakan ada saldo keuangan jemaat yang cukup besar, padahal tidak sesuai dengan nilai uang yang sebenarnya, sebagaimana yang ada dalam brankas maupun rekening bank. Selisih keuangan antara saldo yang tercantum dalam buku kas dan fakta keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPP jemaat sebesar Rp. 133.217.092,- (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan puluh dua rupiah). Dalam menyikapi hal ini, dalam lingkup Majelis Jemaat sendiri sudah terjadi perbedaan pendapat. Pada umumnya menghendaki bendahara untuk mempertanggungjawabkan keuangan yang menjadi selisih kurang tersebut, alias dengan menggantinya. Namun ada pula yang menuntut untuk mengenakan disiplin gereja kepada yang bersangkutan, sesuai konsekuensi jabatan yang disandangnya. Permasalahan ini menjadi menarik, karena bendahara sendiri merasa tidak bersalah dalam pengelolaan keuangan tersebut, padahal sudah jelas-jelas menimbulkan masalah.

Dalam sidang sisi-sidi jemaat yang berlangsung cukup tegang, BPP maupun peserta sidang sisi sebagai representasi jemaat, ternyata tidak berani menyatakan dengan tegas bahwa persoalan keuangan jemaat merupakan akibat kesalahan dari bendahara. Kondisi ini seakan-akan mendukung pernyataan bendahara yang terus bertahan tidak bersalah dan tidak menggunakan uang untuk kepentingan pribadi, sehingga tidak bersedia mengganti selisih kurang keuangan jemaat. Sebab menurut bendahara, bahwa pengelolaan keuangan jemaat tidak dilakukannya sendirian. Dalam situasi sidang sisi yang menegangkan tersebut, tua-tua jemaat menghendaki agar persoalan dapat diselesaikan dengan bijak, tidak perlu dibesar-besarkan. Jangan sampai masalah keuangan ini, justru menimbulkan kekacauan atau bahkan perpecahan dalam jemaat. Artinya, selisih keuangan jemaat dianggap tidak perlu dipersoalkan, walaupun hal inilah sebenarnya yang memicu persoalan dalam jemaat.

Sidang sisi-sidi jemaat pada akhirnya menghasilkan keputusan yang kontroversial, yaitu menerima laporan pertanggungjawaban Majelis Jemaat tentang keuangan jemaat tahun 2014, dengan catatan saldo terakhir yang dipakai atau diakui, yaitu sesuai fakta keuangan yang ada pada kas dalam bulan berjalan (Mei 2015), sesuai waktu pelaksanaan sidang sisi-sidi jemaat. Juga dalam sidang sisi-sidi tersebut memutuskan untuk menerima pengunduran diri dari bendahara jemaat, sebab yang bersangkutan sudah menyampaikan surat pengunduran diri sebelum berlangsungnya sidang sisi-sidi jemaat. Keputusan sidang sisi-sidi jemaat yang tidak memberikan penjelasan tentang siapa yang bertanggung jawab dalam carut-marut pengelolaan keuangan, namun mengambil keputusan untuk tidak mempersoalkan selisih kurang sebagai solusi terbaik dalam permasalahan jemaat, terbukti kemudian tidak segera menyelesaikan masalah.

Karena setelah peristiwa sidang sisi-sidi jemaat tersebut, skala konflik internal jemaat meningkat dan panas. Hasil keputusan sidang sisi-sidi seolah-olah menegaskan bendahara jemaat tidak melakukan kesalahan pengelolaan keuangan, seharusnya segera disampaikan kepada warga jemaat dalam ibadah Minggu sehari setelah persidangan. Namun hal itu tidak langsung diumumkan, karena adanya keberatan dari anggota Majelis Jemaat lainnya. Mereka mempersoalkan konsep surat yang hanya ditandatangani sekretaris jemaat, yang isinya secara khusus memuat pernyataan, bahwa bendahara jemaat tidak melakukan kesalahan dalam pengelolaan keuangan jemaat. Pernyataan tersebut dianggap tidak etis, dapat melukai hati dan memancing tanggapan keras dari jemaat.

Dampak dari tidak diumumkannya hasil sidang sisi-sidi dengan segera kepada jemaat, justru menuai reaksi atau tanggapan keras dari mantan bendahara sendiri, yang kemudian membuat klarifikasi secara terbuka melalui koran lokal. Koran Radar Sulteng, pada edisi Sabtu, 16 Mei 2015, memuat pemberitaan berkaitan hasil sidang sisi-sidi jemaat GPID Manunggal yang telah memutuskan bahwa tidak terjadi penyimpangan keuangan jemaat oleh bendahara jemaat.

Pemberitaan masalah internal dalam sebuah koran, sangat disayangkan pada umumnya warga jemaat, yang memberikan tanggapan negatif terhadap pemberitaan tentang kasus internal jemaat di media massa. Bukan hanya internal jemaat yang keberatan atas pemberitaan ini, juga kalangan eksternal, yaitu warga jemaat/gereja lain, yang memandang pemberitaan ini sangat merugikan kesaksian gereja di tengah masyarakat. Komentar-komentar atas kasus yang terjadi dalam jemaat ini kemudian ramai diperbincangkan melalui media sosial facebook (FB), yang

menyebabkan konflik semakin melebar dan mengawan-awan di dunia maya. Media sosial berubah menjadi ruang publik untuk saling melontarkan pendapat, pandangan, bahkan saling menuduh, menghakimi dan membela diri. Semua unek-unek yang tidak terakomodir dalam dunia nyata, disampaikan ke dunia maya, ke ruang publik, sehingga menimbulkan masalah baru, yaitu pencemaran nama baik. Hal yang selanjutnya berbuntut pada saling melapor kepada pihak kepolisian dengan delik aduan pencemaran nama baik melalui IT, yaitu antara mantan bendahara dengan warga jemaat lainnya. Kasus ini sampai ke meja pengadilan, karena kedua pihak yang saling melapor tidak mau berdamai, walaupun sudah dilakukan upaya-upaya mediasi oleh pihak jemaat maupun gereja.

Konflik yang terjadi dalam internal jemaat ini, tentu sangat disayangkan, terlebih karena jemaat-jemaat GPID hadir dan berada di tengah masyarakat Sulawesi Tengah, yang pernah dilanda konflik dan kekerasan bernuansa SARA. Jemaat-jemaat GPID, atau jemaat-jemaat yang terhimpun dalam Sinode Gereja Protestan Indonesia Donggala, tersebar di beberapa wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, Kota Madya Palu, yang sebelumnya merupakan satu kesatuan wilayah Kabupaten Donggala,¹⁰ dan sampai wilayah Kabupaten Poso.¹¹ Warga jemaat-jemaat GPID ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia, khususnya dari Minahasa, Sanger, Talaud, Rampi, Seko, Bali, Jawa, yang datang dan menetap di daerah ini, baik karena program mandiri, sebagai pegawai pemerintah dan aparat keamanan (polisi dan tentara), pindah tempat karena tekanan gerombolan Kahar Muzakhar (DI/TII) maupun transmigrasi oleh pemerintah.¹²

Dari berbagai latar belakang suku dan budaya, warga pendatang yang datang dan menetap di daerah ini bersama warga asli daerah yang telah menerima pemberitaan Injil, membentuk persekutuan jemaat-jemaat GPID, sehingga saat ini terhimpun dalam GPID sekitar 33 kelompok suku dan sub-suku.¹³ Keragaman latar belakang suku dan budaya ini, pada satu sisi merupakan karunia Tuhan, namun di sisi lain tentu memerlukan pengelolaan yang baik pula, agar jemaat-jemaat dapat membangun kehidupan dalam persaudaraan yang rukun dan damai. Selama ini, keragaman suku dan budaya dalam jemaat-jemaat, walaupun terdapat banyak perbedaan satu

¹⁰ Yusak Soleiman, (peny.), *Sejarah Gereja Protestan di Indonesia Jilid 2*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2015), hal. 2.

¹¹ *Ibid.*, hal. 47.

¹² GBM GPID, "*Gereja Protestan Indonesia di Donggala (GPID)*". Sunhodos, Edisi II/2006. Diterbitkan oleh GPI (Gereja Protestan di Indonesia) untuk media komunikasi antar ke 12 Gereja-Gereja Bagian Mandiri GPI, hal. 28-29.

¹³ *Ibid.*

dengan yang lain, namun belum pernah menjadi suatu persoalan yang terlalu rumit diselesaikan. Apalagi sebagian besar warga jemaat merupakan para pendatang dari luar daerah, sehingga ada perasaan senasib dan sepenanggungan di tempat di mana mereka hadir dan berada.

Jemaat-jemaat GPID hidup dan berada di tengah masyarakat yang majemuk, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam. Menurut data agama, penduduk Sulawesi Tengah sebagian besar beragama Islam dengan persentase 72,36%, Kristen 24,51%, Hindu dan Budha 3,13%.¹⁴ Walaupun demikian, beberapa lingkungan pelayanan GPID, mayoritas penduduknya Kristen, seperti daerah Kulawi dan Poso Pesisir. Sebelum terjadi konflik dan kekerasan bernuansa SARA, relasi antarwarga dan komunitas dalam masyarakat sangat harmonis, saling menerima dan menghargai perbedaan keyakinan agama dan latar belakang lainnya. Hal ini ditopang oleh nilai-nilai kearifan lokal, seperti “*Nosarara, Nosabatutu*”, yang berarti: “bersaudara bersatu” atau “bersama kita satu”,¹⁵ dan “*Sintuwu Maroso*”, yang berarti “kehidupan bersatu teguh dan kuat”.¹⁶ Lukman S. Thaher, seorang Tokoh Muslim Sulawesi Tengah, mengakui kenyataan ini dan menggambarkan kondisi masyarakat Sulawesi Tengah yang majemuk dari segi agama, karakter budaya, identitas etnik dan sebagainya, sebagai sebuah mozaik yang indah, sambil mengutip pernyataan seorang Antropolog Perancis, Claude Levi-Strauss, yang berbunyi: “Keragaman ada di belakang, di depan dan bahkan di sekeliling kita”.¹⁷

Situasi dan kondisi keragaman yang harmonis inilah yang sempat terkoyak-koyak, akibat meletusnya kerusuhan Poso, yang bernuansa SARA, pada tahun 1998 – 2007,¹⁸ dan hingga kini masih meninggalkan luka batin dan traumatik bagi para korban. Informasi ini perlu dikemukakan, dengan maksud memberikan gambaran tentang realitas konteks di mana jemaat-jemaat GPID hadir dan berada. Sebab menurut Emanuel Gerrit Singgih, gereja perlu sadar akan konteksnya, sehingga menjadi gereja yang kontekstual, yaitu gereja yang memahami masalah yang terjadi di

¹⁴Tentang Propinsi Sulawesi Tengah, <http://www.sultengprov.go.id/profil-sulteng/sekilas-sulteng/65-tentang-propinsi-sulawesi-tengah>; Diakses tanggal 3 Oktober 2011.

¹⁵Nosarara Nosabatutu Konsep Kebudayaan Kota Palu, <https://palungataku.wordpress.com/2009/02/>; Diakses tanggal 28 Februari 2009.

¹⁶ Culture For Moving Forward: Still Sintuwu Maroso, Sintuwu Maroso Menjadi Sintuwu Molonco, budaya-poso-blogspot.com/2011/07/still-sintuwu-maroso.html?m=1. Diakses tanggal 28 Juli 2011.

¹⁷ Mohamad Nasir (ed.), *Meretas Perdamaian: Masa Depan Sebuah Masa Lalu*, (Palu: Lakpesdam NU Sulawesi Tengah, 2009), hal. 12.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 65.

sekitarnya.¹⁹ Dengan pemahaman yang jelas terhadap realitas konteks akan membangun kesadaran kuat bagi jemaat-jemaat tentang makna kehadirannya, sehingga jemaat-jemaat GPID bukannya menjadi bagian dari masalah, melainkan menjadi solusi dari permasalahan. Sebab jemaat-jemaat hadir dan berada, serta terpanggil untuk menjawab kebutuhan yang ada di sekitarnya. Dengan memahami realitas konteksnya, maka jemaat-jemaat dapat berperan dengan baik dan memberikan kontribusi yang positif dalam melaksanakan tugas panggilan dan pelayanannya.²⁰

Jemaat-jemaat GPID, sejak awal proses pemandirian menjadi Sinode Gereja Protestan Indonesia Donggala, yang sebelumnya merupakan daerah Pekabaran Injil GMIM (Gereja Masehi Injili di Minahasa), dalam rapat sinode GMIM, di Gereja Sion Tomohon, pada tanggal 28-31 Oktober 1964,²¹ telah mengingatkan tentang panggilan pengutusan gereja di daerah ini, yaitu untuk menjadi garam dan terang dunia (Mat. 5:13-16). Richardson Siwy, yang menulis “Sejarah Gereja Protestan Indonesia di Donggala (GPID)”, menjelaskan hal ini sebagai berikut:

*Gereja yang akan menunjukkan kebajikannya dalam seluruh aspek kehidupan dan pelayanan agar Bapa di surga dimuliakan. Menjadi garam yang tidak hanya memberi rasa enak tetapi yang mampu mencegah kebusukan. Tidak hanya menjadi terang yang dapat bersinar, tetapi terang yang mengusir kegelapan dan menyingkapkan segala sesuatu yang gelap.*²²

Dengan demikian, jemaat-jemaat GPID diharapkan untuk menjadi garam dan terang, khususnya dalam realitas konteks di mana GPID hadir dan berada, yaitu untuk membawa perdamaian di tengah masyarakat Sulawesi Tengah yang majemuk. Hal ini tidak mungkin dapat dilaksanakan secara efektif, apabila dalam internal jemaat sendiri terjadi konflik. Boleh-boleh saja terjadi konflik, namun harus mampu menyelesaikannya dengan baik, sehingga tercipta suasana perdamaian, yang selalu diharapkan di tengah kehidupan bersama. Sebab jemaat-jemaat GPID sendiri menghayati, bahwa seluruh tugas pelayanan bersama ke masa depan ada dalam perspektif

¹⁹ Emanuel Gerrit Singgih, *Mengantisipasi Masa Depan: Berteologi Dalam Konteks di Awal Millenium III*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2004), hal. 56.

²⁰ Makmur Halim, *Gereja di Tengah-tengah Perubahan Dunia*, (Malang: Gandum Mas, 2011), hal. 15-22.

²¹ Yusak Soleiman, (peny.), hal. 17.

²² *Ibid.*, hal. 38-39.

“Shalom Kerajaan Allah”.²³ Artinya, jemaat-jemaat GPID menghayati panggilannya untuk menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah, antara lain, yaitu perdamaian antarsesama dan alam semesta.

Konflik yang terjadi dalam internal jemaat, walaupun tidak selalu harus dipandang negatif, sebab mungkin ada hikmat di balik dari semua itu, namun sangat mempengaruhi kehidupan persekutuan, pelayanan dan kesaksian jemaat. Apalagi konflik ini berkaitan dengan persoalan pengelolaan keuangan jemaat yang akan berdampak bagi penerimaan keuangan jemaat, bahkan rentan perpecahan jemaat, yang berarti dapat menghambat penyelenggaraan atau penatalayanan jemaat. Sebab jemaat-jemaat GPID masih bergumul dengan masalah keuangan, karena jemaat-jemaat belum mandiri dari sudut pendanaan. Sedangkan dana merupakan faktor yang penting dan dibutuhkan dalam menunjang pelayanan dan kesaksian jemaat, baik dalam membangun persekutuan jemaat ke dalam maupun dalam melaksanakan panggilan ke luar untuk mewujudkan harapan membawa perdamaian di tengah masyarakat yang majemuk.

1.2. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka pokok-pokok permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Tata kelola yang baik (good governance), khususnya dalam pengelolaan keuangan jemaat-jemaat belum dilaksanakan sesuai dengan aturan dan standar yang semestinya. Hal ini karena aturan dan standar yang disepakati, atau yang sudah dibuat belum dimengerti baik oleh para pengelola keuangan di tingkat jemaat, bahkan aturan-aturan yang dibuat belum menyentuh kebutuhan atau sulit diterapkan di tengah jemaat. Di samping itu, masih kurangnya pemahaman jemaat-jemaat tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan bertanggung jawab, sehingga sejak dini melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan. Bukan ketika ada permasalahan, baru sibuk mencari di mana kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan keuangan. Hal lain yang juga belum menjadi perhatian, yaitu tentang pemilihan atau penetapan para pelayan khusus, secara khusus mereka yang dipercayakan untuk mengelola keuangan, bukan sekedar karakter pribadi yang harus

²³ Keputusan Sidang Am Sinode GPID XXIII 2013, “*Pokok-pokok Tugas Panggilan Bersama Gereja Protestan Indonesia Donggala (PTPB-GPID) dan Renstra 2013-2018*”, Pusdiklat GPID Jono’oge, tanggal: 8-14 Juli 2013, hal. 2.

mendapat perhatian, tetapi juga kesanggupan dan kebolehannya menangani tugas dan tanggung jawab tersebut. Demikian pula dengan warga jemaat yang rindu melayani Tuhan melalui pelayanan di tengah jemaat, seharusnya memberi diri dengan tulus tanpa kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok, semata-mata untuk melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang dianugerahkan kepada mereka. Karena itu, seyogyanya ketika sadar bahwa tugas dan tanggung jawab yang diberikan jemaat tidak sesuai dengan keterampilannya, mestinya menolak dengan tegas, agar jangan menjadi batu sandungan dalam pelayanan.

- b. Konflik yang terjadi di tengah-tengah jemaat, khususnya di jemaat GPID Manunggal Palu, sebagaimana yang digambarkan sebelumnya, berakar dari masalah pencatatan, perhitungan, dan pertanggungjawaban, atau tata kelola yang tidak transparan dan akuntabel. Dengan kata lain, pengelolaan keuangan yang diterapkan di jemaat ini tidak sesuai dengan aturan dan standar yang baku. Timbulnya masalah-masalah di sekitar pengelolaan keuangan, sehingga berbuntut berkembangnya eskalasi konflik ke mana-mana, menunjukkan ketidakjelasan dalam penyelesaian kasus dan tidak adanya ruang terbuka bagi warga jemaat untuk menyampaikan pergumulan yang dihadapi. Jemaat belum mampu atau tidak siap menghadapi konflik, sehingga konflik yang terjadi justru berdampak buruk bagi kehidupan persekutuan, pelayanan dan kesaksian jemaat. Apakah jemaat cukup memahami bahwa konflik diperlukan sebagai bagian dari dinamika jemaat yang sedang berkembang?
- c. Berkaitan dengan visi gereja dalam perspektif “Shalom Kerajaan Allah”, yang intinya untuk menghadirkan perdamaian di tengah masyarakat yang majemuk, kelihatannya belum dihayati secara baik oleh jemaat-jemaat GPID. Apa relevansi dari visi itu terhadap kehidupan jemaat-jemaat saat ini? Bagaimana jemaat-jemaat GPID memahami dan mengaplikasikan visi ini dalam aksi-aksi atau tindakan-tindakan sehari-hari dalam kerangka mewujudkan visi tersebut? Walaupun masalah pengelolaan keuangan jemaat, tidak secara langsung bersinggungan dengan visi tersebut, namun mempunyai peranan yang penting menopang upaya-upaya untuk menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah.

1.3.Rumusan Masalah.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Permasalahan apa yang sesungguhnya terjadi dalam jemaat/gereja, sebagai dampak dari tata kelola keuangan jemaat yang tidak baik, yang ditinjau dari aspek kelembagaan, kebijakan dan prosedur, sumber daya manusia, aset dan fasilitas, dan akuntabilitas?
- b. Kelemahan-kelemahan apa yang dilakukan dari aspek kelembagaan, kebijakan dan prosedur, sumber daya manusia, aset dan fasilitas, dan akuntabilitas, dalam pelaksanaan tata kelola keuangan jemaat / gereja, yang mempengaruhi keutuhan persekutuan dan menghambat pelayanan jemaat?
- c. Bagaimanakah mekanisme tata kelola keuangan jemaat yang baik, ditinjau dari aspek kelembagaan, kebijakan dan prosedur, sumber daya manusia, aset dan fasilitas, dan akuntabilitas, yang dapat meminimalisir konflik internal, terlebih dalam membangun nilai-nilai perdamaian di tengah jemaat dan masyarakat?
- d. Sejauh mana dampak yang akan terjadi, apabila tata kelola keuangan yang baik diterapkan dalam kehidupan persekutuan jemaat / gereja, menuju terciptanya perdamaian?

1.4. Tujuan Penelitian.

Penelitian akan dilaksanakan di jemaat GPID Manunggal Palu, yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman Majelis Jemaat, Badan Pengawas Perbendaharaan (BPP) dan Badan Pertimbangan (BP) Jemaat, serta warga jemaat setempat terhadap tata kelola yang baik, khususnya tentang pengelolaan keuangan jemaat yang profesional, transparan dan akuntabel, dalam hubungan antara pengelolaan keuangan jemaat dengan konflik internal jemaat, serta peran jemaat dalam rangka membawa perdamaian di tengah masyarakat yang majemuk.

1.5. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat sebagai berikut :

- a. Penelitian ini dilakukan sebagai bagian dari persyaratan penyelesaian studi Pasca Sarjana (S2) di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, dalam Program Studi Kajian Konflik dan Perdamaian bidang minat Studi Perdamaian (MAPS). Hasil penelitian ini diharapkan akan memperkaya pengembangan kajian konflik dan studi perdamaian.
- b. Penelitian ini pula diharapkan menjadi sumbangan pemikiran, sekaligus bentuk perhatian dan keprihatinan penulis kepada Sinode Gereja Protestan Indonesia Donggala secara

kelembagaan dalam menangani berbagai konflik internal jemaat yang berkaitan dengan tata kelola keuangan, serta jemaat-jemaat dalam menata organisasi dan sistem tata kelola yang baik terhadap keuangan jemaat dengan prinsip profesionalitas, transparansi dan akuntabel, sehingga tercipta sebuah kelembagaan / organisasi yang baik dan terpercaya, atau yang *good corporate governance*.

1.6. Metode Penelitian.

Model evaluasi yang akan digunakan dalam rangka mengevaluasi sejauhmana pengelolaan keuangan jemaat, yang menjadi sebab timbulnya konflik internal jemaat, khususnya di jemaat GPID Manunggal Palu, sehingga jemaat belum mampu berperan dalam membangun perdamaian di tengah masyarakat, adalah model CIPP (Context, Input, Process, Product). Model ini ditawarkan pertama kali oleh Stufflebeam pada tahun 1965, ketika mengevaluasi ESEA (the Elementary and Secondary Education Act), yang mana evaluasi ini bertujuan dalam rangka perbaikan situasi.²⁴ Model evaluasi ini banyak digunakan dalam dunia pendidikan, manajemen, perusahaan, dan sebagainya. Dengan memakai evaluasi ini diharapkan akan memperoleh jawaban atau pemahaman yang lebih baik terhadap permasalahan dalam jemaat untuk melakukan perbaikan yang diperlukan, sehingga terbangun semangat jemaat mengembangkan perannya di tengah masyarakat.

Sesuai dengan nama model ini, yaitu model evaluasi CIPP, yang merupakan singkatan dari Context, Input, Process dan Product, maka keempat dimensi inilah yang akan menjadi fokus perhatian dalam evaluasi. Keempat dimensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Context (konteks). Dimensi ini berbicara tentang lingkungan di mana program / kegiatan yang akan dievaluasi berlangsung. Apa saja yang perlu dievaluasi? Hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang permasalahan, kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan, aset dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Dengan evaluasi konteks, sebenarnya akan memudahkan dalam membuat perencanaan, menentukan kebutuhan yang diharapkan dan merumuskan tujuan program.²⁵ Dalam rangka penelitian

²⁴ S. Eko Putro Widoyoko, *Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 181.

²⁵ *Ibid*, hal. 182.

ini, maka evaluasi konteks dapat menjelaskan tentang akar persoalan yang menimbulkan kontraproduktif terhadap pengelolaan keuangan jemaat.

- b. Input (masukan). Dimensi masukan yang akan dievaluasi ini dimaksudkan untuk menilai alternatif pendekatan, rencana tindak lanjut, strategi, pembiayaan dan prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan. Beberapa hal penting yang menjadi bagian dari input yang perlu dievaluasi ialah mengenai sumberdaya manusia, sarana dan peralatan, dana/anggaran, dan berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan.²⁶ Bagian ini diharapkan akan menjelaskan bagaimana perekrutan dan kinerja sumberdaya manusia yang menangani pengelolaan keuangan jemaat, serta bagaimana perencanaan dan pengelolaan keuangan dalam mendukung pelaksanaan tujuan jemaat.
- c. Process (proses). Dimensi proses, yaitu mengevaluasi implementasi dari rencana yang telah ditetapkan. Sejauhmana yang sudah direncanakan dan ditetapkan telah direalisasikan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Evaluasi proses ini penting untuk menilai kelangsungan program dan hasil yang diperkirakan akan dicapai, juga tentunya hambatan-hambatan yang sekiranya ditemukan. Melalui evaluasi proses, maka juga akan diketahui mekanisme pengelolaan keuangan jemaat, terutama dalam pembelanjaan keuangan jemaat. Sebab jemaat / gereja merupakan organisasi yang membelanjakan uang,²⁷ sehingga diharapkan akan diketahui bagaimana proses pengelolaan keuangan jemaat berlangsung, yang kemudian berdampak pada persoalan internal jemaat.
- d. Product (hasil). Evaluasi product (hasil) dilakukan untuk menilai sejauhmana hasil yang dicapai; apakah hasilnya sudah sesuai dengan yang diharapkan, sehingga kegiatan dapat dilanjutkan dan dikembangkan. Atau hasilnya tidak seperti yang diharapkan, sehingga kegiatan harus dihentikan atau dimodifikasi. Menurut Stufflebeam, evaluasi product ini dapat dibagi ke dalam penilaian terhadap dampak, efektifitas, keberlanjutan, dan daya adaptasi.²⁸ Dengan dimensi terakhir ini, yang berkaitan dengan penelitian ini, diharapkan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Edgar Walz, *Bagaimana Mengelola Gereja Anda? : Pedoman Bagi Pendeta dan Pengurus Awam*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2013), hal. 127.

²⁸ Binham's Blog, *Model-model Evaluasi Pendidikan*, <https://binham.wordpress.com/2012/01/07/model-model-evaluasi-pendidikan/>. Diakses tanggal 7 Januari 2012.

untuk menjelaskan segala sesuatu yang menjadi sebab terhambatnya tujuan pelaksanaan panggilan jemaat di tengah masyarakat.

Dengan model evaluasi CIPP ini, maka diharapkan memperoleh informasi yang luas tentang pengelolaan keuangan jemaat yang sudah terjadi, serta mendapatkan masukan-masukan yang diperlukan dalam mengarahkan seluruh program pelayanan jemaat-jemaat GPID dalam menjawab berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang-peluang untuk dapat berperan aktif dalam menciptakan perdamaian.

Pendekatan penelitian, atau metode ilmiah, yang digunakan adalah deskripsi kualitatif. Pendekatan ini menawarkan suatu cara yang tepat dalam meneliti suatu permasalahan secara logis melalui pengamatan yang hati-hati dan sangat teliti, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terkontrol dan teruji.²⁹ Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena yang terdapat pada subyek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks tertentu dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.³⁰ Melalui pendekatan ini diharapkan akan mendapatkan data-data yang diperlukan, di mana selanjutnya penulis akan membuat suatu deskripsi naratif dari hasil penelitian.

Penelitian akan dilaksanakan di jemaat GPID Manunggal Palu, di mana penulis hidup dan beraktifitas, serta memiliki akses secara langsung dalam berbagai interaksi sosial, sehingga akan memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi dan penelitian. Jemaat ini sangat diharapkan menjadi barometer bagi jemaat-jemaat lain di GPID, namun yang sedang menghadapi masalah sehubungan dengan pokok penelitian, yaitu berkaitan dengan tata kelola keuangan jemaat. Karena itu, hasil dari penelitian ini akan sangat bermanfaat dan dapat ditransfer kepada jemaat-jemaat lainnya, secara khusus dalam lingkungan GPID.

Untuk memperoleh data-data, atau informasi yang diperlukan dalam evaluasi dan penelitian ini, maka penulis tidak mungkin akan mewancarai keseluruhan warga jemaat, yang berjumlah kurang lebih 1.589 jiwa (410 KK). Dalam wawancara yang akan dilakukan, penulis akan mewawancarai beberapa tokoh jemaat, yang dipandang dapat mewakili jemaat, serta

²⁹ Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Panduan Membuat Tugas Akhir/Karya Ilmiah*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hal. 103.

³⁰ *Ibid*, hal. 114-115.

memberikan pandangan, pendapat dan masukan yang diharapkan. Para informan yang akan diwawancarai, yaitu Majelis Jemaat (ketua dan bendahara), BPP (ketua), dan BP (ketua) jemaat GPID Manunggal Palu, dan tokoh jemaat lainnya, yang dianggap benar-benar memahami permasalahan jemaat, khususnya berkenaan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Dengan informan yang cukup memahami, apalagi sebagai yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti, maka sudah memenuhi kecukupan informan yang diperlukan dalam penelitian kualitatif. Mereka bukan dijadikan sebagai sampel, melainkan benar-benar dianggap memahami pokok permasalahan penelitian, sehingga dapat memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Mereka juga mempunyai kaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan tata kelola keuangan jemaat.

Karena penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, maka indikator atau ukuran yang bersifat kuantitatif tidak dirumuskan. Untuk memperoleh informasi, penjelasan dan variabel yang digunakan dalam memahami permasalahan dan hasil yang diharapkan, maka penulis akan melakukan wawancara dengan para informan yang benar-benar memahami pokok permasalahan yang diteliti, dengan dibantu pedoman sesuai standar model evaluasi CIPP dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dibuat atau disusun oleh penulis sebelum melakukan wawancara.

Wawancara akan dilakukan di rumah informan atau di gedung gereja, dengan waktu yang disesuaikan dengan kondisi. Sebelum wawancara, penulis akan membuat kesepakatan sebelumnya dengan informan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pokok yang akan diwawancarai. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan terstruktur sesuai model evaluasi CIPP, serta diupayakan pertanyaan-pertanyaan yang sama kepada semua informan. Sehingga diharapkan apa yang menjadi sasaran dan tujuan dari penelitian berhasil dicapai.

Selain melalui teknik wawancara, maka penulis juga akan menggali informasi melalui Focus Group Discussion (FGD) sesuai topik penelitian, yaitu “Tata Kelola Yang Baik (good governance) Keuangan Jemaat”. Di samping itu, untuk melengkapi hasil penelitian, maka penulis melakukan pengamatan secara langsung, dan memanfaatkan dokumen-dokumen gereja yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Hal ini cukup mudah bagi penulis untuk memperolehnya, karena penulis bukan orang dari luar jemaat, justru merupakan bagian dari kehidupan jemaat yang diteliti, sehingga sedikit banyak memahami dinamika jemaat yang

bersangkutan. Hasil yang diperoleh akan dikonfirmasi atau dibandingkan dengan informasi-informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Pengumpulan data-data sudah dimulai dengan pengamatan secara langsung dan membuat pertanyaan-pertanyaan sesuai model evaluasi CIPP, sehingga ketika akan melaksanakan wawancara mendalam, tidak secara tiba-tiba masa tiba akal. Sudah ada struktur dalam pemikiran penulis, sehingga melalui pertanyaan-pertanyaan yang mengarah akan mendapatkan tanggapan yang sesuai sasaran yang diharapkan. Walaupun nantinya pasti akan terjadi perkembangan dalam percakapan / wawancara, tetapi setidaknya-tidaknya tidak akan melenceng jauh, melainkan tetap fokus kepada pokok persoalan. Para informan yang sudah dipersiapkan, yaitu para tokoh jemaat, yang mewakili unsur Majelis Jemaat Harian (MJH), Badan Pengawas Perbendaharaan (BPP) dan Badan Pertimbangan (BP), yang akan memberikan pendapat dan pandangan mereka berdasarkan pengetahuan, pengamatan dan pengalaman mereka terkait pokok penelitian. Selanjutnya dibuat kesepakatan dengan para informan sebelum wawancara, agar memberikan masukan-masukan yang diperlukan, tanpa ada tekanan dari siapa pun, demi memperbaiki keadaan jemaat sebagaimana yang diharapkan pada masa mendatang.

Tahap selanjutnya ialah pelaksanaan wawancara dengan para informan. Wawancara akan dilaksanakan di rumah para informan atau di gedung gereja, atau di tempat lain, dengan batasan waktu minimal 30 menit dan maksimal 1 jam, atau disesuaikan dengan keadaan. Dalam proses wawancara, penulis akan menggunakan tape recorder dan membuat transkrip dari wawancara, serta catatan hal-hal yang bersifat non-verbal yang dianggap perlu diamati selama proses wawancara. Hal ini diperlukan saat akan menganalisis hasil wawancara atau penelitian yang dilakukan.

Selain itu, penulis akan mengumpulkan data-data dari dokumen-dokumen yang ada di jemaat, yang berkaitan dengan permasalahan pengelolaan keuangan jemaat. Semua data-data yang berhasil dikumpulkan ini, selanjutnya akan diproses.

Data dan informasi yang berhasil dikumpulkan akan diproses. Diawali dengan melaksanakan pengecekan keabsahan data, agar data dan informasi yang diperoleh benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Berkaitan dengan penelitian kualitatif, maka ada beberapa teknik yang dapat dilakukan. Pertama, penilaian kredibilitas (credibility), yaitu bagaimana menilai kebenaran data dan informasi yang berhasil dikumpulkan. Hal ini dilakukan peneliti dengan

kehadiran dan pengamatan secara langsung, pengamatan terus-menerus, triangulasi (pendekatan multidimensi), diskusi dengan teman sejawat, pengecekan atas kecukupan referensi, dan sebagainya. Kedua, penilaian transferabilitas (transferability), yaitu berupaya memastikan bahwa hasil penelitian yang dilakukan pada hal-hal tertentu dapat ditransfer ke tempat lain yang mempunyai tipologi yang sama. Ketiga, penilaian dependabilitas (dependability), yaitu menilai kembali seluruh proses penelitian yang dilakukan, apakah sudah memenuhi unsur kehati-hatian peneliti, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penelitian. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengundang atau melibatkan orang lain yang berkompeten dalam mereview aktifitas penelitian. Keempat, penilaian konfirmabilitas (confirmability), yaitu untuk menilai kualitas hasil dari penelitian, dengan cara mempertanyakan kembali semua data dan informasi, serta interpretasi dan sebagainya apakah sudah sesuai dengan seluruh proses pemeriksaan dari awal.³¹

Selanjutnya semua data dan informasi, serta dokumen-dokumen yang berhasil dikumpulkan akan diseleksi dan diklasifikasikan sesuai persamaan dan perbedaannya untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Data-data tersebut kemudian diolah sesuai masalah penelitian, serta akhirnya dianalisis dengan mempergunakan kata-kata yang sederhana untuk menjelaskan masalah penelitian, sehingga dapat dimengerti dengan baik oleh pembaca. Dalam hal ini pula, aspek-aspek yang dievaluasi dengan model evaluasi CIPP, bisa dipergunakan dan membantu dalam mendeskripsikan permasalahan penelitian. Karena struktur pertanyaan-pertanyaan yang diberikan disesuaikan dengan bagian-bagian tersebut.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini sesuai pendekatan kualitatif, maka harus mengikuti prosedur sebagai berikut:

- (1) Analisis deskriptif, yaitu dengan mengembangkan kategori-kategori yang sesuai/relevan dengan tujuan yang ingin dikembangkan,
- (2) Penafsiran atas hasil analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori yang sesuai, dalam hal ini akan memakai teori keagenan.

Deskripsi yang dipakai akan mengikuti pendekatan fenomenologis, di mana peneliti akan berusaha memahami permasalahan melalui orang-orang yang berada di sekitar permasalahan yang diteliti. Artinya, peneliti berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual dari mereka, bagaimana

³¹ *Ibid.*, hal. 187-188.

mereka mengerti dan mengembangkan pengertian mereka terhadap permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Sebab sebagaimana yang dipahami oleh para fenomenolog, bahwa manusia mempunyai berbagai cara dalam menafsirkan pengalaman melalui interaksi dengan orang lain, pengalaman yang terjadi itulah yang diakui sebagai kenyataan.³²

Dengan demikian, mengacu pada metode analisis sebagaimana yang dikemukakan, maka proses pengumpulan informasi dan data-data yang dikumpulkan akan diolah dan diinterpretasikan secara kualitatif dalam rangka menjawab masalah penelitian. Selanjutnya data-data tersebut akan ditafsirkan menjadi kategori-kategori untuk mendukung atau mengembangkan teori yang diformulasikan secara deskriptif.

1.7.Sistematika.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bagian ini akan diuraikan tentang permasalahan yang menjadi latar belakang penelitian, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaatnya, metode penelitian, serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA KONSEPTUAL DAN TEORITIS

Bagian ini merupakan kajian literatur yang menguraikan tentang pengertian dan prinsip tata kelola yang baik (good governance); pengertian, fungsi dan tujuan pengelolaan keuangan secara umum dan keuangan jemaat secara khusus; kajian konflik yang menjelaskan tentang pengertian dan realitas konflik dalam jemaat; perdamaian yang membahas tentang maknanya, visi shalom Kerajaan Allah, serta GPID dan visi perdamaianya; landasan teoritik yang digunakan, yaitu teori keagenan dan relevansinya terhadap jemaat, model evaluasi dan kerangka pemikiran penulis.

BAB III TATA KELOLA KEUANGAN JEMAAT GPID MANUNGAL PALU

Bagian ini menyajikan tentang hasil penelitian penulis sehubungan dengan pokok permasalahan tata kelola keuangan jemaat GPID Manunggal Palu, yang akan diawali dengan gambaran secara umum lokasi penelitian, dan selanjutnya bagaimana pelaksanaan tata kelola keuangan jemaat yang

³² *Ibid.*, hal. 65-66.

dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek kelembagaan, kebijakan dan prosedur, sumber daya manusia (SDM), aset dan fasilitas, dan akuntabilitas.

BAB IV TATA KELOLA KEUANGAN JEMAAT GPID MANUNGGAL PALU DARI PERSPEKTIF TATA KELOLA YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN TEORI KEAGENAN

Bagian ini merupakan pembahasan terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang ditinjau dari sudut pandang tata kelola yang baik (good governance) maupun teori keagenan, dan bagaimana model tata kelola keuangan jemaat yang baik guna meminimalisir konflik internal dan menguatkan peran jemaat membawa perdamaian.

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

Bagian ini akan menyatakan pemahaman penulis sebagai kesimpulan, yang berdasarkan hasil dan pembahasan hasil penelitian, serta menyatakan tentang keterbatasan dari penelitian dan saran-saran untuk penelitian lebih lanjut.

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan.

Tata kelola keuangan yang baik dalam persekutuan jemaat atau gereja merupakan sesuatu yang mendasar dan perlu mendapat perhatian untuk mengembangkan penatalayanan jemaat. Tata kelola keuangan yang baik akan memberdayakan warga jemaat / gereja untuk berpartisipasi melaksanakan pelayanan dan kesaksian guna menghadirkan damai sejahtera. Sebab bagaimana mungkin pelayanan kepada orang banyak / publik dapat terlaksana dengan baik, secara efisien, efektif dan berdaya guna, apabila orang-orang yang diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk mengelola segala potensi dan harta kekayaan yang ada dalam jemaat, tidak benar-benar melakukannya dengan baik.

Salah satu bagian penting dalam rangka tata kelola yang baik (good governance), yaitu berkaitan dengan tata kelola keuangan jemaat / gereja. Ada banyak permasalahan yang timbul dalam jemaat, disebabkan oleh kelemahan dalam tata kelola keuangannya. Karena jemaat belum menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, antara lain profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya. Profesionalitas, yaitu berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, yang menggerakkan dan mengelola keuangan jemaat. Transparansi, berkaitan dengan akses yang terbuka luas bagi orang-orang yang dilayani terhadap segala proses keuangan dan dinamika persekutuan, sehingga menumbuhkan dukungan dan partisipasi jemaat. Sedangkan akuntabilitas terkait dengan pertanggungjawaban para pelaksana, khususnya pengelola keuangan, terhadap kepercayaan yang diberikan dalam bentuk laporan keuangan.

Sekalipun organisasi jemaat memiliki tujuan yang bersifat pelayanan dan non-profit oriented, namun tidak berarti harus mengabaikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Sebab pertumbuhan dan perkembangan pelayanan jemaat demi mewujudkan visi dan misinya, sangat dipengaruhi oleh bagaimana mengelola keuangan secara bertanggung jawab. Tanpa tata kelola keuangan yang baik, bukan saja akan berdampak terhadap timbulnya berbagai permasalahan dan konflik internal, melainkan juga akan merugikan persekutuan, kesaksian dan pelayanan jemaat di tengah masyarakat.

Jemaat GPID Manunggal Palu mempunyai sejarah yang panjang, yang tidak bisa dipisahkan dari kehadiran kesatuan Yonif 711/Raksatama, yaitu anggota dan keluarga ABRI/TNI-AD yang beragama kristiani. Oleh karena kerinduan untuk beribadah dan membangun spiritualitas mereka, maka terbentuklah persekutuan pelayanan yang bersifat oikumenis. Sebab anggota dan keluarga ABRI/TNI-AD ini berasal dari berbagai latar belakang denominasi gereja. Dalam proses selanjutnya, jemaat ini bernaung dalam lingkungan pelayanan Sinode GPID, karena kedudukan sinode ini berada di kota Palu. Jemaat ini diberi nama “Manunggal”, yang terinspirasi dengan kemanunggalan / kesatuan ABRI dan rakyat, tetapi juga memperoleh makna dari doa Yesus (Yohanes 17:21) tentang kemanunggalan yang mengatasi perbedaan dan merobohkan tembok-tembok pemisah. Sebab kehadiran jemaat yang tidak terlepas dari keberadaan Yonif 711/Raksatama (keluarga ABRI/TNI-AD) dan keragaman latar belakang jemaat.

Penelitian terhadap tata kelola keuangan jemaat GPID Manunggal Palu, memperlihatkan berbagai kelemahan dalam penerapan tata kelola yang baik (good governance). Beberapa aspek yang diteliti, yaitu berkaitan dengan aspek kelembagaan, prosedur dan kebijakan, sumber daya manusia (SDM), aset dan fasilitas, dan akuntabilitas, dirasa masih jauh dari harapan jemaat.

Pada aspek kelembagaan, jemaat GPID Manunggal Palu tidak bisa dipisahkan dari Sinode GPID, baik dari segi badan hukum, peraturan-peraturan dan ketetapan gereja lainnya, yang lahir dari kesepakatan bersama jemaat-jemaat se-GPID sebagai konsekuensi dari sistem presbiterial-sinodal. Semua kesepakatan tersebut dalam rangka menata peri-kehidupan dan pelayanan jemaat-jemaat GPID. Kelemahan dalam kelembagaan, karena jemaat-jemaat ternyata kurang memahami dan mematuhi secara konsisten segala kesepakatan secara sinodal, terlebih yang berkaitan dengan program kerja dan tata kelola keuangan jemaat yang tidak berdasarkan visi dan misi gereja. Di samping itu, walaupun secara kelembagaan jemaat, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola keuangan, sudah memakai standar akuntansi keuangan secara umum, namun proses pelaksanaannya tidak berjalan secara optimal, karena tenaga administrasi yang tidak handal dan aktifitas pengelola keuangan yang tidak bekerja secara full time.

Kebijakan dan prosedural begitu diperlukan dalam jemaat, karena keuangan jemaat tidak selalu tersedia, juga untuk mengarahkan keuangan jemaat agar benar-benar dapat digunakan secara efisien, efektif dan berdaya guna bagi jemaat. Namun kebijakan dan prosedural sering tidak berjalan sesuai dengan harapan, karena belum dibuatnya standar tata kelola keuangan yang

mengatur secara detail, atau belum ada standar operasional pelaksanaan (SOP), yang berkaitan dengan kebijakan dan prosedur keuangan jemaat. Karena itu, kebijakan dan prosedur masih ditentukan oleh pemahaman dan kemauan dari penanggung jawab keuangan, khususnya bendahara jemaat. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya berbagai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan jemaat.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) dari pengelola keuangan jemaat masih sangat lemah. Hal ini disebabkan oleh karena rekrutmen pengelola keuangan yang tidak berdasarkan kompetensi atau latar belakang pendidikan mereka. Seharusnya orang-orang yang bertanggung jawab mengelola keuangan, baik bendahara maupun staf keuangan jemaat, dan mereka yang dipercayakan untuk mengawasi keuangan jemaat (BPP), memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni mengenai akuntansi keuangan, sehingga dapat mengadministrasikan dan mengawasi keuangan secara profesional. Walaupun memang kompetensi saja tidak cukup, apabila tidak disertai dengan nilai-nilai kepribadian kristiani, seperti integritas, kejujuran dan takut akan Tuhan. Juga diyakini apabila seseorang mempunyai nilai-nilai kepribadian yang baik dan benar-benar memberi diri terhadap panggilannya, maka dia akan berusaha belajar dan memperlengkapi diri untuk memenuhi tanggung jawabnya.

Aset dan fasilitas yang ada dalam jemaat pun belum terkelola dengan baik. Pengelolaan aset dan fasilitas jemaat masih bersifat manual. Walaupun sebagian sudah menggunakan komputerisasi, namun belum menggunakan sistem IT yang terprogram dengan baik. Untuk menggunakan sistem IT yang terprogram dengan baik, sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan jemaat, memerlukan biaya yang tidak sedikit. Terutama pula memerlukan tenaga-tenaga yang terampil dalam bidang IT, khususnya bagi mereka yang dipercayakan sebagai pengelola keuangan. Hal inilah yang belum mampu dipersiapkan oleh jemaat GPID Manunggal Palu.

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari pengelola keuangan maupun perangkat pelayanan dalam jemaat, pertama-tama kepada Tuhan, kemudian kepada warga jemaat melalui laporan pertanggungjawaban program kerja dan keuangan jemaat. Melalui laporan keuangan yang disampaikan dalam rapat-rapat Majelis Jemaat maupun dalam sidang sisi-sidi jemaat, serta pengawasan oleh Badan Pengawas Perbendaharaan (BPP), maka ditemukan berbagai kelemahan dalam pengelolaan keuangan jemaat. Kelemahan-kelemahan ini berkaitan dengan kebijakan dan

prosedural, karena belum adanya aturan main yang detail dan jelas semacam “*System Operational Procedure*” maupun kualitas sumber daya manusia (SDM) dari penanggung jawab keuangan jemaat.

Jadi tata kelola keuangan jemaat GPID Manunggal Palu dari perspektif tata kelola yang baik (good governance) masih memerlukan perbaikan-perbaikan agar dapat meminimalisir berbagai permasalahan jemaat dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaat dan masyarakat. Sedangkan dari perspektif teori keagenan, Majelis Jemaat sebagai agen, yang seharusnya melaksanakan segala kepercayaan yang diberikan oleh jemaat (principal) dengan penuh tanggung jawab, namun ternyata tidak mampu memenuhi harapan yang diberikan. Karena dalam pelaksanaan program kerja dan laporan keuangan yang disampaikan menunjukkan masih adanya permasalahan keagenan. BPP sebagai team auditor yang diharapkan independen dan dapat menjembatani kepentingan Majelis Jemaat dan jemaat, juga belum dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Akhirnya, jemaat / gereja perlu pandangan yang baru tentang keuangan dan bagaimana mengelolanya dengan baik. Memang uang bukan segala-galanya bagi jemaat / gereja, namun bila keuangan jemaat / gereja tidak terkelola dengan baik dan bertanggung jawab, bukan tidak mungkin dapat merusak segala yang baik. Visi dan misi jemaat / gereja pasti akan sulit tercapai, sehingga menghambat peran jemaat / gereja untuk membawa pembaharuan di tengah masyarakat, bangsa dan negara. Tata kelola keuangan jemaat yang baik, bukan hanya menjadi sarana untuk meminimalisir konflik dalam jemaat, melainkan juga sebagai usaha kreatif untuk mencegah konflik dan membangun perdamaian.

5.2. Keterbatasan.

Penulis menyadari, bahwa penelitian yang dilakukan sebagai upaya meminimalisir konflik internal dan menguatkan peran dari jemaat GPID Manunggal Palu dan jemaat-jemaat GPID pada umumnya, untuk membawa perdamaian di tengah masyarakat majemuk di Sulawesi Tengah, belum menjawab semua akar permasalahan yang mempengaruhi eksistensi jemaat dalam melaksanakan panggilan dan pengutusannya. Penelitian ini memiliki cakupan yang terbatas, karena berangkat dari suatu kasus yang benar-benar terjadi di tengah jemaat GPID Manunggal Palu, yang disebabkan masalah pengelolaan keuangan jemaat. Sebab sesungguhnya realitas permasalahan dalam jemaat sangat kompleks.

Penelitian yang dilakukan pun terbatas, karena tidak membahas masalah-masalah, misalnya yang berkaitan aspek spiritualitas, motif-motif dan perilaku dari pengelola keuangan maupun perangkat pelayanan lainnya, yang sebenarnya cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan panggilan pelayanan dan penatalayanan jemaat. Jadi tesis ini hanya memberi perhatian khusus kepada bagaimana tata kelola keuangan jemaat yang terjadi selama ini dalam kerangka tata kelola yang baik (*good governance*). Walaupun demikian tesis ini tentu akan membawa pengaruh positif bagi jemaat-jemaat dan gereja untuk semakin menggumuli pelaksanaan tata kelola penatalayanan jemaat / gereja sebagai sesuatu yang mendasar dalam memberikan pelayanan yang terbaik di tengah masyarakat.

5.3. Rekomendasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan dan keterbatasan kajian ini, maka penulis menyampaikan beberapa rekomendasi, baik kepada Majelis Sinode GPID, jemaat GPID Manunggal maupun jemaat-jemaat lain dalam lingkungan GPID, beberapa hal :

1. Sosialisasi berbagai kesepakatan secara sinodal, baik Tata Gereja, peraturan dan ketetapan gereja, pokok-pokok tugas panggilan bersama dan renstra, yang di dalamnya memuat visi, misi dan tujuan gereja perlu benar-benar diupayakan dengan baik. Untuk itu, perlu membentuk team untuk menyosialisasikan semua keputusan sinode, sekaligus memberikan pendampingan teknis kepada jemaat-jemaat agar dapat mengimplementasikan sebagaimana yang diharapkan, sehingga seluruh jemaat GPID berada dalam satu arakan bersama menuju kepada kemajuan gereja.
2. Keuangan jemaat / gereja selama ini belum dikelola dengan baik, walaupun cukup disadari begitu mempengaruhi maju mundurnya persekutuan, kesaksian dan pelayanan jemaat / gereja. Untuk itu, perlu membuat "*system operational procedur*" (SOP) tentang tata kelola keuangan jemaat / gereja yang baik, sehingga jemaat-jemaat mempunyai panduan yang jelas dan detail untuk mencegah berbagai penyimpangan dalam jemaat. Selain itu, rekrutmen terhadap pengelola keuangan harus benar-benar mendapat perhatian dengan mempertimbangkan kemampuan administrasi dan akuntansi keuangan seseorang. Jika memungkinkan, seorang bendahara seharusnya memiliki sertifikasi akuntansi keuangan dan tentu memiliki pula karakter terpuji, sehingga meningkatkan kepercayaan jemaat terhadap keuangan jemaat.

3. Untuk meningkatkan kemampuan penatakelolaan keuangan jemaat / gereja, maka perlu melakukan pembinaan-pembinaan dan pelatihan-pelatihan intensif terhadap perangkat pelayanan, khususnya mereka yang dipercayakan untuk mengelola keuangan jemaat / gereja. Selain itu, jemaat / gereja perlu mengembangkan sistem keuangan berbasis IT yang terprogram, sehingga akan meningkatkan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas keuangan jemaat / gereja.
4. Untuk mewujudkan visi jemaat / gereja, maka jemaat / gereja perlu membuat program kerja secara terencana dan bertahap, bukan saja dalam bentuk program jangka pendek, rencana program kerja dan anggaran pendapatan dan belanja satu tahunan pelayanan, seperti selama ini sudah dilaksanakan, tetapi perlu juga membuat program jangka menengah (2-3 tahun) dan jangka panjang (5-10 tahun). Program-program yang direncanakan dan dilaksanakan benar-benar dipikirkan dan dipertimbangkan dengan baik sesuai visi dan misi jemaat / gereja. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan gereja tidak hanya mengulang-ulang dari tahun ke tahun, melainkan secara terencana dan bertahap, bahkan berkesinambungan pelaksanaannya, sehingga mencapai sasaran sesuai visi yang dicanangkan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Alkitab, Kamus :

Alkitab Terjemahan Baru (TB). Jakarta : Lembaga Alkitab Indonesia, 2008.

Pusat Bahasa - *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2015.

W.R.F. Browning - *Kamus Alkitab: A Dictionary of the Bible*. Jakarta: Gunung Mulia, 2008.

Buku-buku Terbitan :

Artanto, Widi, *Gereja dan Misi-Nya: Mewujudkan Kehadiran Gereja dan Misi-Nya di Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2015.

Barna, George, *Tanpa Visi Gereja Hancur!!: Temukan dan Terapkan Visi Tuhan bagi Pelayanan Anda*, Malang: Gandum Mas, 2009.

Beyer, Ulrich. dan Simamora, Evalina. *Memberi Dengan Sukacita: Tafsir dan Teologi Persembahan*, Jakarta: Gunung Mulia, 2008.

Brownlee, Malcolm, *Tugas Manusia Dalam Dunia Milik Tuhan: Dasar Theologis Bagi Pekerjaan Orang Kristen Dalam Masyarakat*, Jakarta: Gunung Mulia, 1987.

Ceunfin, Frans, dan Baghi, Felix, (peny.), *Mengabdikan Kebenaran: Menyongsong HUT ke-80 P.Jozef Pieniazek SVD*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2005.

Dwiyanto, Agus, (ed.), *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.

End, Th. Van Den. *Harta Dalam Bejana: Sejarah Gereja Ringkas*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1986.

Galtung, Johan, *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban*, Surabaya: Pustaka Eureka, 2003.

Halim, Makmur. *Gereja di Tengah-tengah Perubahan Dunia*. Malang: Gandum Mas, 2011.

- Halverstadt, Hugh F. *Mengelola Konflik Gereja*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004.
- Harmono, *Manajemen Keuangan: Berbasis Balanced Scorecard Pendekatan Teori, Kasus, dan Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hutagalung, Sutan M. *Identitas Kepemimpinan Pelayan Gereja : Dalam Konteks Kemandirian Theologia, Daya, dan Dana*. Jakarta: Gunung Mulia, 1997.
- Ikbar, Yanuar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Panduan Membuat Tugas Akhir/Karya Ilmiah*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Kartikasari, S.N. (peny.), *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council Indonesia, 2001.
- Karundeng, August Corneles T. *Etika Anti Korupsi : Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Kristen Dalam Konteks Persoalan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Grafika KreasIndo, 2015.
- Kreider, Robert S. dan Gossen, Rachel Waltner. *Ketika Orang Beriman Bertengkar: Studi Kasus Penyelesaian Konflik*. Jakarta: Gunung Mulia, 2004.
- Lederach, John Paul. *Transformasi Konflik*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press, 2005.
- Muller-Fahrenholz, Geiko, *Rekonsiliasi: Upaya Memecahkan Spiral Kekerasan Dalam Masyarakat*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2005.
- Nasir, Mohamad (ed.), *Meretas Perdamaian: Masa Depan Sebuah Masa Lalu*. Palu: Lakpesdam NU Sulawesi Tengah, 2009.
- Nouwen, Henri J.M. *Peacework: Mengakarkan Budaya Damai*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Pfitzner, V.C. *Kekuatan Dalam Kelemahan: Tafsiran atas Surat 2 Korintus*. Jakarta: Gunung Mulia, 1999.
- Pruitt, Dean G. dan Rubin, Jeffrey Z. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Rule, James B. *Theories of Civil Violence*. California: University of California Press, 1988.
- Seputra, Yulius Eka Agung. *Manajemen dan Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

- Setiawati, Lilis. *Gampang Menyusun Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011.
- Singgih, Emanuel Gerrit. *Mengantisipasi Masa Depan: Berteologi Dalam Konteks di Awal Millenium III*. Jakarta: Gunung Mulia, 2004.
- Siwy, Richardson, (peny.). *GPID Jemaat Manunggal : Sejarah Kehadiran dan Kiprahnya*. Palu: GPID Manunggal Palu, 2011.
- Soleiman, Yusak, (peny.), *Sejarah Gereja Protestan di Indonesia Jilid 2*. Jakarta: Gunung Mulia, 2015.
- Stufflebeam, Daniel L. and Shinkfield, Anthony J., *Systematic Evaluation: A Self-Instructional Guide to Theory and Practice*. Boston: Kluwer Nijhoff Publishing, 1985.
- Sulistitiyani, Ambar Teguh, (ed.), *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2011.
- Susabda, Yakub B. *Prinsip-prinsip Pertimbangan Utama Dalam Administrasi Gereja*. Malang: Gandum Mas, 2002.
- Trijono, Lambang, *Pembangunan sebagai Perdamaian: Rekontruksi Indonesia Pasca-konflik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Walz, Edgar, *Bagaimana Mengelola Gereja Anda? : Pedoman Bagi Pendeta dan Pengurus Awam*. Jakarta: Gunung Mulia, 2013.
- Widoyoko, S. Eko Putro, *Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Wink, Walter, (peny.), *Damai Adalah Satu-satunya Jalan: Kumpulan Tulisan tentang Nir-kekerasan dari Fellowship of Reconciliation*. Jakarta: Gunung Mulia, 2009.

Majalah, Dokumen :

GBM GPID, “*Gereja Protestan Indonesia di Donggala (GPID)*”. Sunhodos, Edisi II/2006.
Diterbitkan oleh GPI (Gereja Protestan di Indonesia) untuk media komunikasi antar ke
12 Gereja-Gereja Bagian Mandiri GPI.

Keputusan Sidang Am Sinode GPID XXIII 2013, “*Pokok-pokok Tugas Panggilan Bersama
Gereja Protestan Indonesia Donggala (PTPB-GPID) dan Renstra 2013-2018*”,
Pusdiklat GPID Jono’oge, tanggal: 8-14 Juli 2013

Laporan Pendataan Jemaat se-GPID Tahun 2014. Dokumen Majelis Sinode GPID.

Laporan Pertanggungjawaban Program Kerja dan Keuangan Jemaat GPID Manunggal Palu,
Tahun 2014. Dokumen Majelis Jemaat GPID Manunggal Palu.

Laporan Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat GPID Manunggal Palu, Tahun 2014. Dokumen
BPP Jemaat GPID Manunggal Palu.

Pedoman Kerja Tata Laksana Administrasi: Keuangan-Pembukuan-Perbendaharaan dan
Administrasi Gereja Lingkup Jemaat GPID. Majelis Sinode Harian GPID, 2004.

Tata Gereja GPID. Palu : Majelis Sinode GPID, 2003.

Situs Online. Web :

Agency Theory (Teori Keagenan) – Davishare, www.davishare.com/2015/01/agency-theory-teori-keagenan.html.

Binham’s Blog, *Model-model Evaluasi Pendidikan*, <https://binham.wordpress.com/2012/01/07/model-model-evaluasi-pendidikan/>. Diakses tanggal 7 Januari 2012.

Culture For Moving Forward: Still Sintuwu Maroso, Sintuwu Maroso Menjadi Sintuwu Molonco,
budaya-poso.blogspot.com/2011/07/still-sintuwu-maroso.html?m=1, Diakses tanggal
28 Juli 2011.

Nosarara Nosabatutu Konsep Kebudayaan Kota Palu, <https://palungataku.wordpress.com/2009/02/>; Diakses tanggal 28 Februari 2009.

- Pengertian Menurut Para Ahli, <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-pengelolaan-keuangan-menurut-para-ahli/> , Diakses tanggal 18 Desember 2015.
- Relevansi Teori Thomas Hobbes/Andi M.Reza – [www.academia.edu / 6403215 / RELEVANSI_TEORI_THOMAS_HOBBS](http://www.academia.edu/6403215/RELEVANSI_TEORI_THOMAS_HOBBS).
- Tentang Propinsi Sulawesi Tengah, <http://www.sultengprov.go.id/profil-sulteng/sekilas-sulteng/65-tentang-propinsi-sulawesi-tengah>; Diakses tanggal 3 Oktober 2011.
- Teori Agensi, <https://dukuntansi.wordpress.com/2012/01/13/teori-agensi/> Diakses tanggal 13 Januari 2012.
- Teori Keagenan (Agency Theory) / Randhy Ichsan, <https://bungrandhy.wordpress.com/2013/01/12/teori-keagenan-agency-theory/> , Diakses tanggal 12 Januari 2013.
- Tersia Musanti, Penyimpangan Manajemen Keuangan Gereja: Memanfaatkan Celah antara Profesionalisme dan Program Kerja, www.sabdaspacespace.org/keuangan_gereja_antara_profesionalisme_dan_pelayanan. Diakses tanggal 28 Juli 2008.